
SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Oka Reza Aditya
Universitas Sangga Buana

Welly Surjono
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga
wellykoe_66@yahoo.com

Abstrak

Perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat, pemberian otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Identifikasi masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana sistem pengendalian intern, bagaimana kualitas laporan keuangan daerah dan seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan asosiatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah kuesioner. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis regresi, koefisien korelasi, koefisien determinasi dan hipotesis uji t. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah menghasilkan nilai $r = 0,603$, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan positif. Analisis determinasi menghasilkan $Kd = 36,36\%$, artinya sistem pengendalian intern memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebesar 36,36% sementara sisanya sebesar 63,64% kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh faktor lain. Uji hipotesis menghasilkan $t_{hitung} 2,831 > t_{tabel} 2,145$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu

Keywords: *Sistem Pengendalian Intern; Kualitas Laporan Keuangan Daerah*

INFLUENCE OF INTERNAL CONTROL SYSTEM ON QUALITY OF REGIONAL FINANCIAL REPORTING

Abstract

Changes in the system of government from centralized to decentralization led to improved management and accountability, so in the current era of regional autonomy the regions are given the authority to administer and manage all government affairs outside the central government's affairs, the provision of regional autonomy is expected to increase efficiency, effectiveness and accountability of the public sector in Indonesia. To achieve effective, efficient, transparent and accountable state finance management, it is imperative to exercise control over the conduct of government activities. Identify the problems discussed in this paper is how the internal control

system, how the quality of local financial statements and how much influence the system of internal control on the quality of local financial statements at Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu. The research method used is descriptive and associative with data collection technique is done is questioner. While the analysis used is regression analysis, correlation coefficient, coefficient of determination and t test hypothesis. Based on the results of research can be seen that the implementation of internal control system to the quality of local financial statements produce value $r = 0.603$, which indicates that there is a strong and positive influence. Determination analysis yields $Kd = 36,36\%$, it means internal control system give influence to quality of regional financial report equal to $36,36\%$ while the rest equal to $63,64\%$ quality of local financial report influenced by other factor. Hypothesis test yields $t_{count} 2,831 > t_{tabel} 2,145$, then H_0 is rejected and H_a accepted, it means there is influence between internal control system to the quality of regional financial statements at the Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu

Kata kunci: Internal Control System; Quality of Local Financial Report

PENDAHULUAN

Perubahan pada sistem pemerin tahan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban, maka dalam era otonomi daerah seka rang ini daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat, pemberian otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisien si, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan kewe nangan pemerintah daerah sebagai mana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu perencanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaran pemerintahan. Disisi lain, dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan perencana naan dimaksud, pemerintah daerah perlu membuat suatu laporan hasil pelaksanaan APBD untuk memper tanggungjawabkan pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan . Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) tersebut di atas harus berpedoman dan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (Chabib dan Heru, 2010)

Laporan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas pemerintahan dan sekali gus merupakan salah satu tolak ukur kinerja *financial* pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuang an Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan dig unakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan eko nomi, sosial dan politik. Sementara bagi pihak internal pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk penilaian kinerja.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/ pimpinan lembaga negara, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan

pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pemerintah Daerah yang tujuan rencana kerjanya sudah termaktub dalam sebuah Rencana Kerja untuk jangka waktu yang sudah ditentukan yang selanjutnya dibuatlah Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan Rencana Kerja tersebut. Fungsi pengendalian dilakukan oleh Kepala Daerah melalui suatu Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. (PP 58 Tahun 2005)

Adapun kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menurut pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 merupakan bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, kemudian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh masing-masing kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, *value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh peneliti, yaitu : (1) Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu; (2) Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu; (3) Seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sistem Pengendalian Intern

Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, audit, pelaporan dan telaah sejawat. Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah sebagai berikut: "Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan." Sedangkan pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Permen Dagri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1 (10) adalah: "Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah."

Indikator Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas, yang mencakup:

- a. Nilai integritas dan etika
Memelihara suasana etika organisasi, menjadi teladan untuk tindakan-tindakan yang benar. Menghilangkan godaan-godaan untuk melakukan tindakan yang tidak etis dan menegakkan disiplin sebagaimana mestinya.
- b. Komitmen terhadap kompetensi
Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah.
- c. Kepemimpinan yang kondusif
Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan.
- d. Memiliki struktur organisasi
Kerangka kerja bagi manajemen dalam perencanaan, pengarahan dan pengendalian organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.
- e. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab
Satuan usaha membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
Penetapan praktik-praktik yang layak dalam hal perolehan, orientasi, pelatihan, evaluasi, pembinaan, promosi, kompensasi dan tindakan disiplin bagi sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

2. Penilaian Risiko

Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

Penaksiran risiko mencakup:

- a. Identifikasi Risiko
Mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.
- b. Analisis Risiko
Menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

3. Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif, yang mencakup:

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
Memantau pencapaian kinerja instansi pemerintah tersebut dibandingkan dengan rencana sebagai tolak ukur kinerja.
- b. Pembinaan SDM
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas aset
Pimpinan instansi pemerintah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai.

- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat instansi pemerintah, kegiatan dan pegawai instansi pemerintah mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.
- f. Pemisahan fungsi
Pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1(satu) orang.
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai.
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai.
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
Menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
Pimpinan instansi pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.
- k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.
Instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

4. Informasi dan komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Kegiatan pengelolaan rutin supervise, perbandingan rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas, dimana evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern.

Kualitas Laporan Keuangan

Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah: "Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan." Sedangkan menurut Mahmudi (2007:11) definisi laporan keuangan adalah: "Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas"

Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja

keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memperkirakan besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasinya apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Asset
2. Kewajiban
3. Ekuitas Dana
4. Pendapatan
5. Belanja
6. Transfer
7. Pembiayaan, dan
8. Arus Kas

Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan demikian, laporan realisasi anggaran menyajikan pendapatan pemerintah daerah dalam satu periode, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan.

2. Neraca

Neraca adalah keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana.

3. Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas, selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan non-anggaran.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Disajikan secara sistematis sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Disamping itu, juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengkonfirmasi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- b. Tepat waktu, informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- c. Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan se lengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyalajannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan
- b. Dapat Diverifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Hubungan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Mahmudi (2007: 27) menyatakan bahwa: "Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi didalamnya menguraikan tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah." Dalam Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemda (2008: 14) dikatakan bahwa: "Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat terwujud jika entitas pemerintah daerah dapat menciptakan, mengoperasikan serta memelihara Sistem Pengendalian Intern yang memadai."

Berkaitan dengan pemerintah daerah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 134 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Gubernur/Bupati/Walikota mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya. Untuk itu, perlu dirancang suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan. Sistem inilah yang disebut dengan Sistem Akuntansi. Pada pemerintah daerah, Sistem Akuntansi. Pada pemerintah daerah, Sistem Akuntansi ditetapkan dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian intern. Kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan dan memelihara sistem pengendalian intern yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan asosiatif. serta penulis memperoleh data dengan menggunakan kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil adalah pegawai pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu dengan jumlah 16 orang. Berhubung jumlah populasi kurang dari 100, maka penulis menggunakan sampel jenuh, sehingga yang dijadikan sampel sebesar 16 orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data primer ini didapatkan melalui teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Metode pengamatan atau *Observasi*
 - b. Metode wawancara atau *Interview* Kuesioner
2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara *sampling*
2. Setelah metode pengumpulan data ditentukan kemudian ditentukan alat untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diteliti yaitu daftar pernyataan atau kuesioner.
3. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengelolaan data, disaji kan dan dianalisis dengan menggunakan uji statistik.
4. Dalam melakukan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan untuk mencapai suatu kesimpulan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan proses analisis uji validitas dan uji reliabilitas

Rancangan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dimulai dengan menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, pemilihan tes statistik dan perhitungan nilai statistik, penetapan tingkat signifikansi dan penetapan kriteria pengujian.

Penetapan hipotesis yang akan diuji dalam kaitan dengan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y, yaitu Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis alternatif (H_a).

Hipotesis Penelitian

H_0 Artinya sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

H_a Artinya sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Hipotesis Statistik

$H_0 : \rho = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh sistem pengendalian intern (variabel X) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (variabel Y).

$H_a : \rho \neq 0$, artinya terdapat pengaruh sistem pengendalian intern (variabel X) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (variabel Y).

Pengujian Hipotesis

- a. Analisis Koefisien Korelasi
- b. Analisis Koefisien Determinasi
- c. Uji statistik

Tingkat signifikan (*level of significance*) yang digunakan adalah 0,05 (5%) dengan derajat kebebasan $dk = n-2$. Tingkat ini dipilih karena dinilai cukup ketat untuk mewakili dalam pengujian kedua variabel tersebut dan merupakan tingkat signifikan yang sering digunakan terutama dalam ilmu-ilmu sosial.

Kriteria-kriteria yang digunakan adalah :

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, berarti H_a ditolak, H_0 diterima

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti H_a diterima, H_0 ditolak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu

Hasil *scoring* menunjukkan bahwa secara total sistem pengendalian intern pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu berada dalam

skor 2084 termasuk kategori sangat baik, ini berada pada rentang kriteria klasifikasi antara 1948,80–2320,00 atau sebesar 89,83%.

Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu

Hasil *scoring* menunjukkan bahwa secara total kualitas laporan keuangan daerah pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu dalam skor 997 termasuk kategori sangat baik, ini berada pada rentang kriteria klasifikasi antara 940,80–1120 atau sebesar 89,02%,

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu

Pengujian hipotesis ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Korelasi

Koefisien korelasi diperoleh hasil sebesar 0,603 yang berarti terdapat arah positif dan tingkat hubungan yang kuat sekali antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah

2. Koefisien Determinan (k_d)

Dari hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebesar 36,36% dan sisanya sebesar 63,64% dipengaruhi faktor lain.

3. Uji Hipotesis

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil $t_{hitung} = 2,831 > t_{tabel} = 2,145$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pembahasan Penelitian Sistem Pengendalian Intern Lingkungan Pengendalian

Responden yang menyatakan bahwa penegakan integritas dan nilai etika pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu ternyata yang menyatakan sangat baik sebesar 53,13% dan yang menyatakan baik sebesar 46,87%. Oleh karena itu, kiranya kepala cabang agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Responden yang menyatakan bahwa komitmen terhadap kompetensi ternyata yang menyatakan sangat baik sebesar 56,25%, dan yang menyatakan baik sebesar 43,75%. Responden yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang kondusif ternyata yang menyatakan baik sebesar 56,25% dan yang menyatakan sangat baik sebesar 43,75%. Responden yang menyatakan bahwa memiliki struktur organisasi ternyata yang menyatakan baik sebesar 50,00%, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 43,75%. Responden yang menyatakan cukup baik sebesar 6,25%. Responden yang menyatakan bahwa pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu ternyata yang menyatakan sangat baik sebesar 50,00% dan yang menyatakan baik sebesar 50,00%. Responden yang menyatakan bahwa penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia ternyata yang menyatakan baik sebesar 62,50%, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 37,50%. Responden yang menyatakan bahwa perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif ternyata yang menyatakan baik sebesar 68,75% dan yang menyatakan sangat baik sebesar

31,25%. Responden yang menyatakan bahwa hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait ternyata yang menyatakan baik sebesar 50,00%, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 43,75%. Responden yang menyatakan cukup baik sebesar 6,25%.

Penilaian Resiko

Responden yang menyatakan bahwa identifikasi risiko ternyata yang menyatakan baik sebesar 56,25%, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 43,75%. Responden yang menyatakan bahwa analisis risiko ternyata yang menyatakan baik sebesar 53,12%, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 46,88%.

Aktivitas Pengendalian

Responden yang menyatakan bahwa review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Provinsi Jawa Barat Sukabumi II Pelabuhan Ratu ternyata yang menyatakan baik sebesar 68,75% dan yang menyatakan sangat baik sebesar 31,25%. Responden yang menyatakan bahwa pembinaan sumber daya manusia ternyata yang menyatakan baik sebesar 75,00%, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 25,00%. Responden yang menyatakan bahwa pengendalian atas pengelolaan sistem informasi ternyata yang menyatakan baik sebesar 75,00% dan yang menyatakan sangat baik sebesar 25,00%. Responden yang menyatakan bahwa pengendalian fisik atas aset ternyata yang menyatakan sangat baik sebesar 56,25%, dan yang menyatakan baik sebesar 43,75%. Responden yang menyatakan bahwa penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu ternyata yang menyatakan baik sebesar 56,25% dan yang menyatakan sangat baik sebesar 43,75%. Responden yang menyatakan bahwa pemisahan fungsi ternyata yang menyatakan baik sebesar 68,75%, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 31,25%. Responden yang menyatakan bahwa otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting ternyata yang menyatakan baik sebesar 56,25% dan yang menyatakan sangat baik sebesar 43,75%. Responden yang menyatakan bahwa pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian ternyata yang menyatakan sangat baik sebesar 68,75%, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 31,25%. Responden yang menyatakan bahwa pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya ternyata yang menyatakan sangat baik sebesar 75,00%, dan yang menyatakan baik sebesar 25,00%. Responden yang menyatakan bahwa akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya ternyata yang menyatakan sangat baik sebesar 75,00% dan yang menyatakan baik sebesar 25,00%. Responden yang menyatakan bahwa dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting ternyata yang menyatakan sangat baik sebesar 75,00%, dan yang menyatakan baik sebesar 25,00%.

Informasi dan Komunikasi

Responden yang menyatakan bahwa menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus ternyata yang menyatakan sangat baik sebesar 52,08% dan yang menyatakan baik sebesar 47,92%.

Pemantauan

Responden yang menyatakan bahwa evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern atau pihak eksternal serta menggunakan daftar uji intern ternyata yang menyatakan sangat baik sebesar 52,08% dan yang menyatakan baik sebesar 47,92%.

Kualitas Laporan Keuangan Daerah Relevan

Responden yang menyatakan bahwa laporan keuangan daerah memiliki manfaat prediktif ternyata yang menyatakan sangat baik sebesar 50,00% dan yang menyatakan baik sebesar 43,75%. serta yang menyatakan cukup baik sebesar 6,25%. Responden yang menyatakan bahwa pelaporan laporan keuangan daerah tepat waktu ternyata yang menyatakan sangat baik sebesar 56,25%, dan yang menyatakan baik sebesar 43,75%. Responden yang menyatakan bahwa laporan keuangan daerah telah lengkap ternyata yang menyatakan baik sebesar 56,25% dan yang menyatakan sangat baik sebesar 43,75%.

Andal

Responden yang menyatakan bahwa laporan keuangan daerah memiliki penyajian jujur ternyata yang menyatakan baik sebesar 56,25% dan yang menyatakan sangat baik sebesar 43,75%. Responden yang menyatakan bahwa laporan keuangan daerah dapat diverifikasi ternyata yang menyatakan sangat baik sebesar 53,13%, dan yang menyatakan baik sebesar 37,50%, serta yang menyatakan cukup baik sebesar 9,37%. Responden yang menyatakan bahwa laporan keuangan daerah memiliki netralitas ternyata yang menyatakan baik sebesar 75,00% dan yang menyatakan sangat baik sebesar 18,75%, serta yang menyatakan cukup baik sebesar 6,25%.

Dapat Dibandingkan

Responden yang menyatakan bahwa perbandingan laporan keuangan daerah dapat dilakukan secara internal dan eksternal ternyata yang menyatakan sangat baik sebesar 58,33%, dan yang menyatakan baik sebesar 41,67%.

Dapat Dipahami

Responden yang menyatakan bahwa batas pemahaman para pengguna terhadap laporan keuangan daerah ternyata yang menyatakan baik sebesar 54,17%, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 43,75%, serta yang menyatakan cukup baik sebesar 2,08%.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa : (1) Sistem Pengendalian Intern pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu sudah sangat baik, dengan perolehan skor aktual sebesar 2084 dibandingkan dengan skor ideal sebesar 2320 atau sebesar 89,83 %; (2) Kualitas laporan keuangan pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu sudah sangat baik, dengan perolehan skor aktual sebesar 997 dibandingkan dengan skor ideal sebesar 1120 atau sebesar 89,02 %. Hal ini didukung dengan kualitas laporan keuangan telah dilakukan secara relevan, andal dan dapat dibandingkan; (3) Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah menghasilkan nilai $r = 0,603$, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif. Analisis determinasi menghasilkan $Kd = 36,36\%$ artinya sistem pengendalian intern memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebesar 36,36% sementara sisanya sebesar 63,64% kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh faktor lain. Uji hipotesis menghasilkan $t_{hitung} = 2,831 > t_{tabel} = 2,145$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Saran

Penulis memberikan saran kepada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu harus membuat SOP yang formal untuk prosedur

pengelolaan keuangan sehingga ada kejelasan struktur organisasi dan pen delegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, harus memperbaiki kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Untuk mengatasi pemborosan keuangan, hendaknya dilakukan evaluasi secara menyeluruh dalam hal pengadaan barang/jasa dengan menetapkan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan sesuai standar, mengurangi pemborosan atau harga yang mahal, serta pemantauan yang ketat dan transparan. Karena ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, harus melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru dan proses sosialisasi yang berkelanjutan, sehingga tidak ada lagi praktek-praktek yang menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan,1992,"Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode", Edisi 5 cetakan pertama. Yogyakarta, BPFE
- I Gusti Agung Rai, 2008,"Audit Kinerja pada Sektor Publik",Jakarta, Selemba Empat.
- Indra Bastian. 2007,"Audit Sektor Publik",Jakarta, Selemba Empat.
- Mahmudi,2007,"Manajemen Kinerja Sektor Publik",Yogyakarta, Unit penerbit & percetakan,Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo,2002,"Akuntansi sektor public",Yogyakarta, Penerbit Andi
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005,"Standar Akuntansi Pemerintahan".
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang "Pengelolaan Keuangan Daerah".
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah", Nuansa Aulia, Bandung
- Permendagri No. 4 Tahun 2008 Tentang "Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah"
- Permendagri No.4 Tahun 2006, tentang "Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri".
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, tentang "Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sadu Wasistiono,2010,"Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah." Bandung,Fokusmedia
- Soleh Chabib dan Rohcmansjah Heru.,2010,"Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah", Bandung, Fokusmedia
- Sugiyono, 2010,"Metode Penelitian Bisnis",Bandung,Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang "Keuangan Negara"

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah”